PERSEKUSI DALAM TINJAUAN *FIQH JINAYAH*

Hanif Azhar
STAI Hasan Jufri Bawean
Email: hanif.azhar15@gmail.com

Abstract

Persecution according to the original meaning is a crime against humanity. Violations of human rights. Even some forms of persecution are classified as genocide. In its development, the use of the word perskusi in Indonesia in cases of coercion, ill-treatment, beatings and so on that occurred in the last three years is considered inappropriate and too excessive. Based on the pattern of criminal acts that occur what is referred to as persecution is actually an act of vigilante who in the criminal law system in Indonesia has been known as eigenrechting. Based on the pattern also, the most common criminal element in the act of vigilantism is entering someone else's house without permission, coercion, kidnapping, torture, and beatings. In the fiqh jinayah review, this crime is also classified into several categories of jarimah. The coercive and kidnapping crimes are classified as Jarimah Hirabah. Persecution and beatings belong to jarimah al-jurh. While entering someone else's house, it is Jarimah Ta'zir.

Keywords: *persecution, vigilantism, jinayah fiqh*

Abstrak

Persekusi menurut makna asalnya merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bahkan beberapa bentuk tindakan persekusi tergolong sebagai genosida. Dalam perkembangannya, penggunaan kata perskusi di Indonesia terhadap kasus-kasus pemaksaan, penganiayaan, pengeroyokan dan sebagainya yang marak terjadi tiga tahun terakhir ini dianggap kurang tepat dan terlalu berlebihan. Berdasarkan pola tindak pidana yang terjadi apa yang sebut sebagai persekusi sebenarnya adalah tindakan main hakim sendiri yang dalam tata hukum pidana di Indonesia telah dikenal dengan sebutan eigenrechting. Berdasarkan polanya pula, unsur pidana yang paling sering terjadi dalam tindakan main hakim sendiri (perskusi) ialah memasuki rumah orang lain tanpa izin, pemaksaan, penculikan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Dalam tinjauan fiqh jinayah, tindak pidana ini juga tergolong dalam beberapa kategori jarimah. Tindak pidana pemaksaan dan penculikan tergolong ke dalam jarimah hirabah. Penganiayaan dan pengeroyokan tergolong ke dalam jairmah al-jurh. Sementara memasuki rumah orang lain tergolong jarimah ta'zir.

Kata kunci: *persekusi, main hakim sendiri, fiqh jinayah*

PENDAHULUAN

Istilah persekusi mulai *viral* di Indonesia sejak awal tahun 2017. Hingga kini istilah ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan, seperti tokoh nasional, akademisi dan LSM. Tindakan persekusi merujuk pada suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak suka dan menuduh pihak lain telah melakukan kesalahan (pelanggaran atau kejahatan) kemudian mereka melakukan tindakan sendiri

untuk “menghakimi” pihak lain itu. Tindakan ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti mencaci, pemukulan, penganiayaan, perusakan hingga terbunuhnya korban.

Banyak kalangan, diantaranya Aryojati Ardipandanto¹, menyinyalir merebaknya kasus persekusi di tanah air diawali dengan kehebohan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama Atau Ahok. Semenjak kasus ini, bermunculanlah kasus-kasus persekusi yang cenderung meningkat dari waktu-ke waktu.

Sebagaimana disampaikan oleh Trias Palupi Kurnianingrum² kasus-kasus itu diantaranya berlangsung pada bulan Mei 2017. Terjadi kasus persekusi dimana sekelompok masa *menggeruduk* korban. Pemicunya ialah postingan di akun media sosial milik korban yang dianggap melecehkan pihak tertentu. Kasus ini menimpa seorang dokter di RSUD Kota Solok Sumatra Barat dan seorang remaja di Cipinang Muara Jakarta Timur. Pada bulan Agustus, seorang korban meninggal dihakimi masa akibat dituduh mencuri *amplifier* sebuah musalla. Pada bulan November, sepasang kekasih dipersekusi dengan tuduhan berbuat mesum. Kasus-kasus serupa masih terus bermunculan hingga kini. Beragam bentuk tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dilakukan di luar koridor hukum dan tidak pula dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berbagai tindakan telah banyak dikaji dari berbagai sisi, seperti politik dan hukum. Dalam tulisan ini, persekusi akan dikaji dari perspektif *fiqh jinayah* atau Hukum Pidana Islam.

PENGERTIAN PERSEKUSI

Persekusi merupakan kata benda. Serapan dari bahasa inggris (*n*) *persecution*. Yang diserap dari bahasa Prancis *persecuter*. Dari bahasa latin *persecut*.³ Dalam bahasa Inggris, Kamus Oxford mengartikan kata *persecution* (*n*) dengan: *Hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs; oppression*

¹ Aryojati Ardipandanto, *Persekusi; Perspektif Demokrasi*, Majalah Info Singkat, Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IX, No. 11, Juni 2017 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 17- 18.

² Trias Palupi Kurnianingrum, *Pengertian Persekusi dari Perspektif Hukum*, Majalah Info Singkat, Hukum, Vol. IX, No. 24, Desember 2017 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 1-2.

³ <https://www.lexico.com/en/definition/persecute>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

(Permusuhan dan perlakuan buruk, terutama karena ras atau keyakinan politik atau agama; penindasan).⁴ Kata kerjanya *persecute* (v). Diartikan: *Subject (someone) to hostility and ill-treatment, especially because of their race or political or religious beliefs* (menundukkan atau menaklukkan (seseorang) pada permusuhan dan perlakuan buruk, terutama karena ras atau keyakinan politik atau agama mereka).

Sementara Kamus Merriam Webster mengartikan *persecution* (n) sebagai: *the act or practice of persecuting especially those who differ in origin, religion, or social outlook* (tindakan atau praktik penganiayaan terutama pada mereka yang berbeda dalam hal asal, agama, atau pandangan sosial).⁵ Sementara *persecute* (v): *to harass or punish in a manner designed to injure, grieve, or afflict specifically : to cause to suffer because of belief* (untuk melecehkan atau menghukum dengan cara yang dirancang untuk melukai, berduka, atau menindas khususnya agar menyebabkan menderita karena kepercayaan).⁶

Dalam Kamus Longman *persecution* (n): *cruel or unfair treatment of someone over a period of time, especially because of their religious or political beliefs* (perlakuan kejam atau tidak adil terhadap seseorang selama periode waktu tertentu, terutama karena kepercayaan agama atau politik mereka).⁷ Sementara *persecute* (v): (1) *to treat someone cruelly or unfairly over a period of time, especially because of their religious or political beliefs* (untuk memperlakukan seseorang dengan kejam atau tidak adil selama periode waktu tertentu, terutama karena kepercayaan agama atau politik mereka); (2) *to deliberately cause difficulties for someone by annoying them often* (sengaja menyebabkan kesulitan bagi seseorang dengan sering mengganggu mereka).⁸

Dalam bahasa Arab kata *persekusi* diterjemahkan dengan اضطهاد. Kamus Almaany mengartikannya dengan:

تجاوز الحدّ في السُّلطة ومعاملة قهريّة تعسُفِيّة ، وانتهاك المبادئ الدستوريّة وخاصّة ما كان متعلّقاً
بحماية حقوق الإنسان.⁹

⁴ <https://www.lexico.com/en/definition/persecution>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁵ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/persecution>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁶ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/persecute>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁷ <https://www.ldoceonline.com/dictionary/persecution>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

⁸ <https://www.ldoceonline.com/dictionary/persecute>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

⁹ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اضطهاد/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019

(Melampaui batas [dalam] kekuasaan dan perlakuan paksa, sewenang-wenang, melanggar prinsip-prinsip konstitusional, terutama perlindungan Hak Asasi Manusia).

Dalam versi aplikasi, Arab-Indonesia, kata *إِضْطِهَاد* diartikan dengan: penindasan; pemaksaan. Sementara *memersekusi* (إِضْطَهَدَ) diartikan:

إِضْطَهَدَ خَصْمَهُ : عَامَلَهُ مُعَامَلَةً قَاسِيَةً ، أَيَّ قَهْرُهُ وَجَارَ عَلَيْهِ ، آذَاهُ.¹⁰

(Memperlakukan dengan kasar; memaksa dan menganiaya; menyakiti).

Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *persekusi* diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.¹¹ Sementara kata kerjanya *memersekusi*. Berarti menyiksa atau menganiaya.¹²

Dari berbagai definisi ini dapat disimpulkan bahwa persekusi merupakan suatu tindak pidana yang tidak tunggal. Ia muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari perlakuan buruk, intimidasi, penganiayaan bahkan pembunuhan. Yang perlu digarisbawahi ialah bahwa persekusi umumnya terkait dengan perbedaan ras, politik dan agama atau keyakinan.

PERSEKUSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Apa yang disebut sebagai persekusi merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai dokumen hukum internasional. Diantaranya secara implisit tercantum dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan atas Genosida) atau Konvensi Genosida tahun 1948 pasal 2 yang menyebutkan bahwa yang disebut genosida ialah: tindakan dengan maksud menghancurkan, keseluruhan atau sebagian, kelompok agama, ras, etnis atau kebangsaan dengan cara (a) membunuh, (b) merusak fisik atau

¹⁰ Ibid.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memersekusi>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019

mental (c) penghancuran fisik; (d) mencegah kelahiran, (e) memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.¹³

Dalam *Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia) atau ICTY tahun 1993 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan disebutkan berbagai tindakan yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan, yaitu: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) deportasi, (e) penjara, (f) penyiksaan, (g) pemerkosaan, (h) *penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama*, (i) tindakan tidak manusiawi lainnya.¹⁴ Redaksi yang kurang lebih sama juga disebutkan dalam *Statute Of The International Tribunal For Rwanda* (Statuta Pengadilan Internasional Untuk Rwanda) Atau ICTR tahun 1994 Pasal 3 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan.¹⁵ Secara eksplisit, menurut David Cohen, ahli hukum internasional dari Stanford University Amerika Serikat, persekusi telah diakui sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara internasional sejak diadopsinya ICTY tahun 1993 dan ICTR tahun 1994 ini. Dalam dua statuta ini persekusi mencakup semua tindakan pembatasan hak-hak dasar dengan unsur diskriminatif berdasarkan ras, politik, atau agama.¹⁶

Dalam *Rome Statute Of The International Criminal Court* (Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional) atau Statuta Roma tahun 1998 Pasal 7 ayat 1 huruf h tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan disebutkan bahwa mahkamah berwenang untuk mengadili tindakan: (h) *Penganiayaan (persekusi) terhadap kelompok apa pun yang berkaitan dengan identitas politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana disebutkan dalam ayat 3, atau alasan lain yang secara universal diakui dilarang berdasarkan hukum internasional*. Penjelasan huruf ini menyebutkan bahwa *persekusi berarti perampasan hak-hak fundamental yang disengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok*. Menurut David Cohen, dengan pasal 7 Statuta Roma ini, terutama

¹³ <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

¹⁴ http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

¹⁵ http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

¹⁶ <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

penjelasannya, cakupan makna persekusi menjadi semakin luas. Semula hanya mencakup semua tindakan pembatasan hak-hak dasar dengan unsur diskriminatif berdasarkan ras, politik, atau agama menjadi mencakup semua tindakan perampasan hak-hak fundamental yang disengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional berdasarkan identitas kelompok.¹⁷ Ia menambahkan, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan, persekusi harus dilakukan dalam konteks serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan maksud mendiskriminasi yang didasari perbedaan ras, politik atau agama.¹⁸

Dari berbagai statuta internasional ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persekusi dalam hukum internasional ialah segala bentuk kejahatan dengan maksud mendiskriminasi yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap suatu kelompok (penduduk sipil) atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan gender, yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.

Menurut Iwan Setiawan persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta dalam situasi yang khusus pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.¹⁹

PERSEKUSI DI INDONESIA

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU ini telah mengadopsi konsep pengaturan mengenai pengadilan HAM dari konsep internasional yang telah ada. Pasal 9 UU ini menyebutkan:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang *meluas* atau *sistematis* yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Iwan Setiawan, *Kajian Yuridis Terhadap Persekusi*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol. 5 No. 2, September 2017 (Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh), 295.

perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. *penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional*; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.

Dalam UU HAM tidak ditemukan kata persekusi. UU ini justru mencantumkan kata lain yang semaksud dengan itu sebagaimana disebut dalam klasifikasi pada huruf h, yaitu penganiayaan. Demikian pula dalam berbagai perundangan lain seperti KUHP. Tidak satupun yang secara eksplisit mencantumkan kata persekusi. Jadi kesimpulannya istilah persekusi tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Telah dijelaskan di muka bahwa apa yang dimaksud dengan persekusi dalam hukum internasional dengan apa yang dimaksud persekusi dalam praktiknya di Indonesia, dalam batas tertentu, tidaklah sama. Premis ini akan dimulai *pertama*, dari definisi persekusi dalam KBBI. *Persekusi* diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.²⁰ Kata kerjanya *memersekusi* diartikan dengan menyiksa atau menganiaya.²¹ Yang perlu digarisbawahi ialah kata *perburuan*. Perburuan sewenang-wenang. Perburuan mengandung pengertian mengejar, memburu dengan tujuan menangkap dan memperlakukan target dengan perlakuan tertentu. Sewenang-wenang berarti dengan tidak mengindahkan hak orang lain; dengan semau-maunya; dengan kuasa sendiri.²² *Kedua*, dari berbagai laporan media tentang praktik persekusi di Indonesia. Dari dua premis ini didapati gambaran tentang apa yang sementara masyarakat anggap sebagai persekusi.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memersekusi>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewenang-wenang>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Nur Pujayanti dan Harry Soeskandi dalam penelitiannya merangkum berbagai kasus persekusi yang dimuat di media masa dan menyimpulkan berdasarkan pola umum bahwa apa yang oleh masyarakat disebut sebagai persekusi sebenarnya ialah tindakan *main hakim sendiri* yang dalam tata hukum Indonesia sudah dikenal dengan istilah *eigenrechting*. Jika bukan, setidaknya itu adalah bentuk baru dari tindakan *main hakim sendiri*.²³

Dalam penelitiannya yang lain Nur Pujayanti menambahkan bahwa memang sebenarnya ada perbedaan antara persekusi dengan tindakan *main hakim sendiri*. Hal ini dilihat dari dua hal, yaitu dari proses tindakan dan motifnya. Berdasarkan proses tindakannya, persekusi diawali dengan mencari dan menemukan target baru kemudian dilakukan eksekusi. Sedangkan *main hakim sendiri*, lebih sering terjadi dalam hal tertuduh tertangkap tangan atau dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan motifnya, persekusi umumnya didasarkan atas alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama atau gender. Sementara *main hakim sendiri*, secara terbatas, dilakukan untuk membela diri. Namun demikian, persekusi dan *main hakim sendiri* memiliki persamaan. *Pertama*, sama-sama dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana. *Kedua*, sama-sama dilakukan tanpa melalui proses atau prosedur hukum yang semestinya.²⁴

Berpijak dari kesimpulan ini, pembahasan selanjutnya tentang persekusi dalam tulisan ini akan mengacu pada kerangka ini.

KBBI mengartikan *main hakim sendiri* dengan menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).²⁵ Kamus Hukum Sindikat mengartikan *main hakim sendiri* dengan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan

²³ Nur Pujayanti dan Harry Soeskandi, *Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14 No. 28, Januari 2018 (Surabaya: Laboratorium Fakultas Hukum Untag, 2018), 241.

²⁴ Nur Pujayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi*, Skripsi, Surabaya Fakultas Hukum Untag, 2018, 44, <http://repository.untag-sby.ac.id/390/6/JURNAL.pdf>, <http://repository.untag-sby.ac.id/390/6/JURNAL.pdf>, 17.

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

pelaksanaan sanksi oleh perorangan.²⁶ Sekedar perbandingan, dalam bahasa Inggris istilah main hakim sendiri dikenal dengan istilah *vigilantism* yang oleh Kamus Oxford diartikan sebagai *law enforcement undertaken without legal authority by a self-appointed group of people* (penegakan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum oleh sekelompok orang yang ditunjuk sendiri).²⁷

Pada bulan Juni 2017, berdasarkan pola kasus persekusi yang telah terjadi di Indonesia, Kabag Penum Divisi Humas Polri saat itu, Kombes Martinus Sitompul, mengatakan bahwa ada 4 macam proses hukum yang dapat menjerat pelaku persekusi. *Pertama*, memasuki rumah atau kantor tanpa seizin pemiliknya yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya. Dijerat dengan Pasal 167 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. *Kedua*, melakukan tindakan pemaksaan. Dijerat Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. *Ketiga*, melakukan penculikan. Diancam dengan pasal 328 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 12 tahun. *Keempat*, melakukan penganiayaan. Dijerat Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara. Jika dilakukan bersama-sama maka dianggap pengeroyokan dan dijerat Pasal 170 KHUP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.²⁸

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa unsur pidana dalam tindakan persekusi yang paling sering dilakukan ada 5: (1) memasuki rumah orang lain tanpa izin, (2) pemaksaan, (3) penculikan, (4) penganiayaan, dan (5) pengeroyokan.

PERSEKUSI DALAM TINJAUAN *FIQH JINAYAH*.

Persekusi dalam bahasan Arab diterjemahkan dengan kata *idṭihād* (إِضْطِهَاد). Masdar (kata benda). Diartikan sebagai [tindakan] melampaui batas [dalam] kekuasaan dan perlakuan paksa, sewenang-wenang, melanggar prinsip-prinsip konstitusional, terutama perlindungan Hak Asasi Manusia.²⁹ Diartikan pula sebagai penindasan atau pemaksaan. Sementara *memersekusi* (إِضْطَهَدَ) diartikan dengan memperlakukan dengan

²⁶ Agen Sindikat, *Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda*, file PDF diunduh dari https://www.academia.edu/16083005/Kamus_Hukum_Terlengkap_-_11.000_istilah_bahasa_Ingggris_and_Belanda?auto=download, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

²⁷ <https://www.lexico.com/en/definition/vigilantism>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

²⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-ada-empat-jeratan-hukum-untuk-pelaku-persekusi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

²⁹ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اضطهاد/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

kasar; memaksa dan menganiaya; menyakiti.³⁰ Definisi pertama tampaknya mengadopsi dari konsep persekusi sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. Jika demikian, term *idthihadd* sebagai salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) merupakan term baru dan tidak dikenal dalam *fiqh jinayah*.

Sejauh ini, dari penelusuran penulis terhadap sumber-sumber berbahasa Arab tidak ditemukan satupun tulisan yang menjelaskan *idthihadd* dalam konteks *fiqh jinayah* atau hukum pidana islam. *Idthihadd* selalu dijelaskan dalam konteks hukum internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia.³¹ Dengan demikian persekusi yang diartikan dengan *idthihadd* bukanlah tindak pidana biasa. Ia adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan kajian mendalam. Meskipun dalam batas tertentu bisa dijelaskan dengan pendekatan *jarimah al-baghy* (pemberontakan). Ini jika konteksnya konflik internal, dalam negeri. Lain hal jika konteksnya antar negara. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada bahwa persekusi atau *idthihadd* ini dalam pengertian tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di dalamnya bisa mencakup berbagai macam tindak pidana biasa. Tergantung perbuatan apa saja yang telah dilakukan pelaku.

Dalam *fiqh jinayah* tindak pidana disebut *jarimah*. Menurut Imam Al Mawardi, *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh allah dengan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.³² Dalam terminologi hukum pidana di Indonesia *jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik.

Mayoritas ulama kemudian membagi *jarimah* ke dalam 3 kategori. Ketiga kategori itu ialah: (1) *Jarimah hudud*, (2) *Jarimah qisas/ diat*, (3) *Jarimah ta'zir*. Pembagian ini paling moderat dan banyak dianut meskipun ada sebagian kecil ulama membaginya menjadi 2 saja menjadi hanya *jarimah hudud* dan *ta'zir* saja dengan

³⁰ Ibid.

³¹ Lihat misalnya artikel Nawal Ahmed Saro Al Khalidi dari Universitas Nahrain Iraq tahun 2013, *Jarimah Al-IdthihaddFi Daui Ahkam An-Nizam Al-Asasiy Li Al-Mahkamah Al-Jinaiy Ad-Dauliyah* (Kejahatan Penganiayaan Berdasarkan Ketentuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional) di <http://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/5312>; Artikel Ala' Abd Al-Wahid, *Jarimah IdthihaddAl-Aqalliyat* (Tindak Pidana Persekusi Terhadap Minoritas) di <https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=150998>; Tulisan Amal Abd Al-Hadi Mas'ud, *Jarimah Al-IdthihaddFi Al-Mawasiq Ad-Dauliyah* (Kejahatan Penganiayaan pada Konvensi Internasional) di https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=48&id=52345&lang=, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ix.

argumen bahwa *jarimah qisas/ diat* hakikatnya masuk dalam *hudud* karena mekanismenya diatur eksplisit dalam nas. Ada pula yang membagi menjadi 4. Pengategorian ini sama dengan 3 kategori dengan menambahkan satu *jarimah* lagi yaitu *jarimah kaffarat*.

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam dengan sanksi had. Sementara sanksi *hadd* ialah sanksi yang telah ditentukan dan diatur oleh syara' dan merupakan hak Allah. Diatur di sini berarti telah secara jelas termaktub di dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Pengaturan itu meliputi jenis tindak pidana dan hukumannya serta mekanisme pembedaannya. *Jarimah qisas/ diat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. *Jarimah ta'zir* ialah segala bentuk *jarimah* yang bukan tergolong dua *jarimah* tersebut. *Jarimah ta'zir* ini merupakan *jarimah* yang paling banyak cakupannya karena *jarimah* inilah yang mekanisme pengaturannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah). Nash tidak mengatur atau mengatur tapi tidak tegas tentang detail aturannya. Berbeda dengan dua macam *jarimah* pertama. *Jarimah hudud* dan *qisas/ diat* secara tegas diatur dalam nash oleh syari'. Manusia tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan yang telah ada.

Jarimah hudud terdiri dari 7 tindak pidana: perzinaan (*zina*), tuduhan perzinaan (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minum minuman keras (*syur bal khamr*), perampokan (*hirabah; qathi' at thariq*), pemberontakan (*baghy*), dan murtad (*riddah*). *Jarimah qisas/ diat* terdiri dari 2 tindak pidana: pembunuhan (*qatl*) dan penganiayaan (*jurh*). Sementara tindak pidana yang tercakup *jarimah ta'zir* hampir tak terbatas jumlahnya. Mencakup tindak pidana *hudud* dan *qisas/ diat* yang tidak terpenuhi syarat-rukunnya (unsur pidananya) dan semua tindak pidana atau pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dan jelas oleh nash.

Berdasarkan unsur pidana yang ada pada tindakan persekusi dapat dipahami bahwa apa yang disebut persekusi sesungguhnya bukanlah suatu tindak pidana tunggal. Dalam satu tindakan persekusi dapat terdiri dari beberapa tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa unsur pidana dalam persekusi setidaknya ada 5 yaitu: (1) memasuki rumah orang lain tanpa izin, (2) pemaksaan, (3) penculikan, (4) penganiayaan, dan (5) pengeroyokan maka dalam perspektif *fiqh jinayah jarimah* yang dilakukan juga

tidak tunggal. Masing-masing unsur tindak pidana dalam persekusi dapat tergolong *jarimah-jarimah* berikut:

1. Penganiayaan (*Jurh*).

Ahmad Wardi Muslich mengutip Abdul Qadir Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.³³ Penganiayaan dalam pengertian ini ialah penganiayaan fisik (badan; jasmani). Dengan begitu penganiayaan verbal tidak tergolong *jarimah* ini sehingga pengaturannya diatur dalam *jarimah ta'zir*. Penganiayaan fisik di sini dapat berupa:

- a. Perusakan atas anggota tubuh (*athraf*) atau bagian lain yang dianggap bagian dari tubuh dengan cara memotong atau melukai.
- b. Pelukaan pada bagian muka dan kepala (*syajja*).
- c. Pelukaan pada bagian tubuh yang tidak tergolong muka, wajah dan *athraf*. Disebut *jirah*. Bagian tubuh dimaksud terbatas pada leher, dada, perut hingga batas pinggul.
- d. Penghilangan fungsi anggota tubuh, seperti pendengaran, penglihatan, dan fungsi otot.
- e. Pemukulan ringan. Yaitu penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka dan hilangnya fungsi anggota tubuh. Akibat dari perbuatan ini biasanya berupa memar, rasa sakit, dan sejenisnya. Menurut Abu Hanifah, pemukulan ringan ini tergolong *jarimah ta'zir*.

Penganiayaan jika dilakukan lebih dari satu orang disebut pengeroyokan. Jadi, pengeroyokan tergolong penganiayaan. Pengaturannya diatur dalam bab turut serta berbuat pidana (*isytirak fi al jaraim*). Tindakan penganiayaan maupun pengeroyokan ini diancam dengan sanksi *qisas* (sebagai hukuman pokok) dan *diat* atau *ta'zir* (keduanya sebagai hukuman pengganti).

2. Perampokan (*Hirabah*)

Menurut Nurul Irfan *hirabah* ialah kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-

³³ Ibid. 179.

nakuti.³⁴ Cakupan makna membunuh untuk menakut-nakuti di sini tidak hanya membunuh. Perbuatan lain dengan tujuan menakut-nakuti termasuk dalam makna ini, seperti gertakan, ancaman, kekerasan, merakit dan meledakkan bom (teror) dan penculikan³⁵. Jadi makna *jarimah hirabah* (perampokan) lebih luas dalam *fiqh jinayah* daripada apa yang kita kenal dalam hukum pidana konvensional di Indonesia.

Istilah lain untuk *hirabah* ialah *qat' at-thariq* (pembegalan). Sekali lagi maknanya akan lebih luas dibanding yang kita kenal dalam hukum pidana konvensional. Sayyid Sabiq mendefinisikan *qat' at-thariq* sebagai Sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan, serta membuat kekacauan di muka bumi.³⁶

Sanksi pidana untuk *jarimah* ini beragam sesuai dengan unsur pidana yang ditimbulkannya. Ulama umumnya membagi unsur *jarimah hirabah* menjadi 4, yaitu:

- a. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban
- b. Dilakukan terang-terangan
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Unsur-unsur *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya dan kesengajaan melakukan tindakan tersebut

Oleh karena itu sanksinya juga dikategorikan ke dalam 4 macam sanksi, yaitu:

- 1) Hukuman mati
- 2) Disalib
- 3) Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang
- 4) Diasingkan (dipenjara. Mayoritas ulama menyatakan selama 1 tahun)

Keempat sanksi ini dilaksanakan keseluruhan sesuai dengan tindakannya, atau sesuai dengan 4 macam *jarimah hirabah* di atas, yaitu:

- a. Membunuh korban tanpa mengambil harta, sanksinya hukuman mati
- b. Membunuh dan merampas harta korban, sanksinya hukuman mati dan disalib
- c. Merampas harta korban, sanksinya potong tangan dan kaki secara bersilang

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah* (Jakarta: Amzah. 2013), 127.

³⁵ Lihat Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah* ..., 127 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Jild 9 (Jakarta: Al Maarif, 1984), 175.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., 175.

- d. Menakut-nakuti korban atau membuat keonaran, sanksinya diasingkan (dipenjara).

Dari sini jelas, bahwa pelaku persekusi yang melakukan pemaksaan dan penculikan dapat dikategorikan melakukan *jarimah hirabah* dengan sanksi sebagaimana tersebut di atas.

3. *Jarimah Ta'zir*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *Jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang paling luas cakupannya. Berdasarkan dasar hukum penetapannya *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 3: (1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* dan *qisas/ diat* yang tidak terpenuhi syarat rukunnya, (2) *Jarimah ta'zir* yang disebut dalam nash tetapi tidak dijelaskan hukumannya, (3) *Jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan oleh nas. Untuk jenis terakhir ini mekanisme pengaturannya dikembalikan kepada *ulil amri*. Berdasarkan pertimbangan masalah *ulil amri* berhak mengaturnya.

Mengutip Abdul Aziz Amir, Ahmad Wardi Muslich membagi *ta'zir* ke dalam 6 kategori;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.³⁷

Lebih jauh, Ahmad Wardi Muslich menerangkan bahwa *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu dapat berupa kesaksian palsu, berbohong (keterangan palsu), menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk rumah orang lain tanpa izin.³⁸

Dari sini jelas, karena memasuki rumah orang lain tanpa izin merupakan *jarimah ta'zir* yang mekanisme pengaturannya dilakukan oleh *ulil amri* maka dalam konteks ini pelaku persekusi yang memasuki rumah orang lain tanpa izin dihukum dengan peraturan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 255- 256.

³⁸ Ibid. 257.

yang ditetapkan oleh *ulil amri*. Dalam konteks Indonesia, perbuatan ini tergolong tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Maka sanksi yang tercantum dalam KUHP Pasal 167 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara sudah sesuai dengan prinsip *fiqh jinayah*.

KESIMPULAN

Persekusi menurut makna asalnya merupakan kejahatan berat yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan beberapa bentuk tindakan persekusi tergolong sebagai genosida. Dalam perkembangannya, penggunaan kata perskusi di Indonesia terhadap kasus-kasus pemaksaan, penganiayaan, pengeroyokan yang marak terjadi tiga tahun terakhir ini dianggap kurang tepat dan terlalu berlebihan. Berdasarkan pola tindak pidana yang terjadi apa yang sebut sebagai persekusi sebenarnya adalah tindakan main hakim sendiri yang dalam tata hukum pidana di Indonesia telah dikenal dengan sebutan *eigenrechting*. Berdasarkan polanya pula, unsur pidana yang paling sering terjadi dalam tindakan main hakim sendiri (perskusi) ialah memasuki rumah orang lain tanpa izin, pemaksaan, penculikan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Dalam tinjauan *fiqh jinayah*, tindak pidana ini juga tergolong dalam beberapa kategori *jarimah*. Tindak pidana pemaksaan dan penculikan tergolong ke dalam *jarimah hirabah*. Penganiayaan dan pengeroyokan tergolong ke dalam *jairmah al-jurh*. Sementara memasuki rumah orang lain tergolong *jarimah ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Iwan Setiawan, *Kajian Yuridis Terhadap Persekusi*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol. 5 No. 2, September 2017 (Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh)
- Nur Pujayanti dan Harry Soeskandi, *Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14 No. 28, Januari 2018 (Surabaya: Laboratorium Fakultas Hukum Untag, 2018)
- Nur Pujayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Untag, 2018)
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah* (Jakarta: Amzah. 2013)

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Jild 9 (Jakarta: Al Maarif, 1984)
- Aryojati Ardipandanto, *Persekusi; Perspektif Demokrasi*, Majalah Info Singkat, Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IX, No. 11, Juni 2017 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Pengertian Persekusi dari Perspektif Hukum*, Majalah Info Singkat, Hukum, Vol. IX, No. 24, Desember 2017 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
- Agen Sindikat, *Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda*,
file PDF diunduh dari
[https://www.academia.edu/16083005/Kamus_Hukum_Terlengkap_-
_11.000_istilah_bahasa_Ingggris_and_Belanda?auto=download](https://www.academia.edu/16083005/Kamus_Hukum_Terlengkap_-_11.000_istilah_bahasa_Ingggris_and_Belanda?auto=download)
- Ala' Abd Al-Wahid, Jarimah Idthihadd Al-Aqalliyat di
<https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=150998>
- Amal Abd Al-Hadi Mas'ud, *Jarimah Al-Idthihadd Fi Al-Mawasiq Ad-Dauliyah* di
[https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=48&id=5234
5&lang=](https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=48&id=52345&lang=)
- Nawal Ahmed Saro Al Khalidi dari Universitas Nahrain Iraq tahun 2013, Jarimah Al-
Idthihadd Fi Daui Ahkam An-Nizam Al-Asasiy Li Al-Mahkamah Al-Jinaiy Ad-
Dauliyah di <http://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/5312>
- <http://legal.un.org>
- <http://www.icty.org>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- <https://kumparan.com>
- <https://www.almaany.com>
- <https://www.ldocconline.com>
- <https://www.lexico.com>
- <https://www.merriam-webster.com>
- <https://www.un.org>
- <https://ylbhi.or.id>
- <http://repository.untag-sby.ac.id>